

Seri Memoria Passionis No.34

**DERITA DAN DUKA MANUSIA ASMAT**  
Laporan Seputar Kejadian Luar Biasa Bidang Kesehatan  
Di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua



Anak-anak Asmat  
Dok. Ptr. Sandro, Rangga, OFM/SKPKC

**Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan  
Fransiskan Papua**

**Juni 2018**



## Pengantar

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia. Secara konstitusi sudah diatur baik itu secara internasional, nasional maupun lokal. Dalam Piagam Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948, pasal 25 dijelaskan setiap manusia berhak atas hidup yang layak dan sehat, berhak mendapat pelayanan sosial yang diperlukan. Peraturan internasional ini sudah diratifikasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam peraturan nasionalnya untuk menjamin kesehatan warganya. Walaupun demikian, hak untuk mendapatkan pelayanan dan hidup yang sehat masih menjadi tugas berat, khususnya di Tanah Papua.

Berbicara soal layanan publik berarti tidak terlepas dari pemberi layanan (Negara dan perangkatnya) serta penerima manfaat layanan tersebut yakni masyarakat. Semua unsur ini harus saling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesehatan. Pada tiga tahun belakangan ini (2016-2018), persoalan kesehatan di Tanah Papua menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan. Persoalan ini hampir selalu terjadi di daerah pedalaman Papua. Sebut saja pada tahun 2016 - 2017, sekitar 129 orang, kebanyakan Balita di Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga harus meninggal karena tidak tertolong<sup>1</sup>. Di tahun 2017, masih di Kabupaten Nduga, Wilayah Yigi, sekitar 30-an Balita yang harus meninggal. Di Kabupaten Deiyai, pada Januari - Juli 2017, sekitar 50 Balita meninggal karena tidak tertolong<sup>2</sup>. Pada Agustus-September 2017, di Kabupaten Lany Jaya juga terjadi hal yang sama, sekitar 19 Balita yang meninggal<sup>3</sup>. Pada September 2017, sekitar 48 orang di Distrik Saminage (Kabupaten Yahukimo) harus meninggal dunia.

Pada akhir tahun 2017 (Oktober) sampai awal tahun 2018 (Januari), masalah kesehatan di Tanah Papua kembali menjadi berita hangat. Masalah Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan di Kabupaten Asmat membuka awal penderitaan di tahun baru 2018. Peristiwa KLB di Kabupaten Asmat memiliki pola yang hampir sama yang terjadi di Kabupaten Nduga, Lany Jaya dan Deiyai dan Yahukimo. Masyarakat yang jauh dari akses layanan kesehatan menjadi korban. Bantuan yang diberikan juga masih terlambat dalam setiap kasus kesehatan di Tanah Papua. Apakah layanan publik dari negara itu secara maksimal baru diberikan ketika ada kasus?

Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) mencoba merangkul penderitaan Manusia Asmat yang hangat diberitakan di awal tahun 2018 tersebut. Laporan kesehatan yang diberi judul "**Derita dan Duka Manusia Asmat**" ini kiranya membantu kita untuk membuka mata melihat realitas kesehatan di Tanah Papua dan secara bersama menemukan cara yang tepat untuk menyelamatkan setiap pribadi dari ancaman kematian. Hidup sehat merupakan harapan kita semua dan sekaligus tanggung jawab kita bersama.

Salam



Ptr. Wilhelmus Ireneus Gonsalit Saur, OFM  
Direktur SKPKC Fransiskan Papua

---

<sup>1</sup>Bdk. Laporan Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga. Kejadian ini juga yang menyebabkan Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan Danius Puras berkunjung ke Papua, 31 Maret 2017.

<sup>2</sup>Bdk. Laporan SKPKC Fransiskan Papua tentang Papua Darurat Kesehatan 2017.

<sup>3</sup>Ibid.,

## DERITA dan DUKA MANUSIA ASMAT

Setiap tahun pada bulan Oktober, Asmat akan ramai dikunjungi para wisatawan. Di bulan itu juga, Asmat akan menjadi terkenal di beberapa media cetak, internet tentang salah satu festival terbesar yakni Festival Budaya Asmat. Moment dimana para seniman Asmat menampilkan hasil karyanya, khusus seni memahat dan mengukir. Namun di awal tahun 2018, sebelum bulan festival itu, Asmat sudah menjadi berita hangat. Bukan berita tentang persiapan festival budaya Asmat tetapi Kejadian Luar Biasa.

Ya, Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang kesehatan, Asmat menjadi berita hangat. Beberapa wilayah di Kabupaten Asmat menjadi topik hangat di awal tahun 2018. Persoalan ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti Asmat, KLB juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Tanah Papua. Laporan ini membantu kita untuk melihat kembali persoalan KLB Asmat dan daerah lainnya di Tanah Papua.

### Sekilas Tentang Asmat

Kabupaten Asmat adalah salah satu wilayah di Provinsi Papua. Di dalam peta Pulau Papua, wilayah Asmat terletak di daerah selatan Papua. Luasan wilayahnya adalah 23.746 Km<sup>2</sup>. Di bagian utara, Kabupaten Asmat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo, bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mappi, bagian barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mimika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi<sup>4</sup>. Alat transportasi yang digunakan untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah yang lainnya adalah transportasi air seperti perahu lokal, speedboat, kapal motor dan lain sebagainya. Manusia Asmat mengkonsumsi sagu, ikan dan hasil alam lainnya sebagai bahan makanan. Seperti manusia Papua pada umumnya, Manusia Asmat sangat bergantung pada alam atau hutannya.

### Informasi Awal

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agats, kejadian ini sudah terjadi pada September 2017. Informasi tentang *Bencana Kemanusiaan* Asmat ini terungkap ketika Uskup Keuskupan Agats Mgr. Aloysius Murwito, OFM melakukan pelayanan Natal, 23-25 Desember di Kampung As dan Atat, Distrik Pulau Tiga. Situasi buruknya kesehatan di dua wilayah itu terekam dan diteruskan oleh salah satu rekan kerja Bapak Uskup Alo ke Media Kompas Indonesia. Informasi buruknya kesehatan ini menjadi berita halaman utama Media Cetak Kompas, Rabu, 10 Januari 2018 dengan judul "Krisis Kesehatan di Asmat: Sebulan, 13 Anak Balita Meninggal<sup>5</sup>". Selanjutnya di bulan Januari sampai Februari, kesakitan dan penderitaan Manusia Asmat terus diceritakan di media cetak, TV dan internet.

### Sebelum Berita KLB 2018

(Bagian ini) Potret ini merujuk dari hasil penelitian dari pengalaman hidup Willem Bobi di Asmat selama tiga tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun (2007-2010), Willem Bobi berpetualangan dan hidup bersama dengan Manusia Asmat. Dia menemukan banyak persoalan terkait kesehatan yang ia rangkum dalam sebuah buku "**Dukun Asmat: Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia**". Buku yang tebalnya sekitar 600-an halaman ini mengulas secara baik persoalan kesehatan Manusia Asmat. Bahkan di dalam bukunya itu, Willem

<sup>4</sup>Bdk. [www.asmatkab.go.id/page/geografi](http://www.asmatkab.go.id/page/geografi), diakses Kamis, 24 Mei 2018

<sup>5</sup>Lihat Kompas, Rabu, 10 Januari 2018, Hlm. 1

sudah menyampaikan bahwa 'sepertinya' sudah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di tahun 2005<sup>6</sup>. Dia mengutip hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Asmat Tohap Capa, "Wabah melanda 27 kampung di lima distrik yakni Distrik Pantai Kasuari, Sawatima, Akat, Atsy dan Distrik Fayit. Sejak pertengahan Juni 2005 sampai kemarin (akhir Juni 2005) dilaporkan 25 Balita meninggal dunia dan itu merupakan kejadian luar biasa".<sup>7</sup> Jelas bagi kita bahwa sudah ada 25 Balita yang meninggal sebelum berita hangat kematian anak-anak Asmat 71 orang pada Januari 2018.

Di bab pertama bukunya itu, Willem memberi judul "Pasien dan Penyakit". Dari bab pertama buku itu, Willem mengulas segala jenis penyakit, kesusahan dan penderitaan Manusia Asmat dalam memperoleh hak hidup sehat, soal sarana dan prasarana kesehatan, pola hidup sehat dan satu point khusus Willem menceritakan Kasus Campak. Kasus Campak yang menjadi topik hangat dalam pemberitaan media di awal tahun 2018. Kejadian Campak sudah terjadi pada tahun 2006 di Kampung Ayan, Warse dan Kampung Pau Luar. Pada tahun itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat memberikan imunisasi dan vitamin A sekitar 372 anak. Program ini diharapkan berkelanjutan sehingga kasus ini benar-benar hilang.

Salah satu hal yang perlu dilihat secara bijaksana adalah adanya tradisi budaya yang melekat pada Manusia Asmat. Seperti di daerah lainnya, Asmat juga memiliki kepercayaan dan tradisi untuk menyembuhkan segala jenis penyakit melalui ritual adat dan tanaman herbal. 'Mungkin' saja situasi ini diamini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan tim medis yang bertugas di Asmat. Hal lainnya adalah medan yang sulit/terisolir dan ketidaksetiaan para petugas medis.

## **Berita di Media: KLB Asmat 2018**

Pada media cetak Kompas, Rabu, 10 Januari 2018, publik kaget dengan peristiwa yang menimpa Manusia Asmat. Pada edisi tersebut, Media Kompas memberitakan penderitaan Manusia Asmat dengan judul "Krisis Kesehatan di Asmat: Sebulan, 13 Anak Balita Meninggal"<sup>8</sup>. Pada Sabtu, 13 dan 14 Januari 2018, Media Cetak Kompas kembali lagi mengangkat situasi kesehatan di Asmat sebagai sebuah 'Bencana' dengan judul beritanya "Bencana Kesehatan di Asmat". Sebuah bencana karena sebanyak 28 anak di Asmat meninggal akibat campak dan gizi buruk. Setelah persoalan yang mungkin 'terbungkus' itu terbuka, barulah dilakukan gerakan penyelamatan medis bagi mereka yang menderita. Hampir sepanjang Januari 2018, wajah-wajah Manusia Asmat dan 'bencana' terus ditampilkan di media cetak, TV, maupun online, baik lokal maupun nasional.

Ya, kejadian luar biasa ini mengundang perhatian yang juga sangat luar biasa dari pemerintah setempat, Papua dan Nasional. Di Harian Cenderawasih Pos (15/1) dan Harian Kompas (16/1), mulai dengan cerita penanggulangan *Bencana Kemanusiaan* tersebut. Pemerintah Kabupaten Asmat mulai membentuk Tim Terpadu untuk turun lapangan ke-23 distrik yang berada di wilayah Kabupaten Asmat. Data terkait meninggalnya Manusia Asmat pun berbeda. Di Harian Cenderawasih Pos menyebutkan angka 59 anak yang dikutip dari data Dinas Kesehatan Asmat, sedangkan di Harian Kompas menyebutkan angka sebanyak 61 Manusia Asmat yang meninggal. Berbeda dengan data dari media, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats mengeluarkan data meninggalnya Manusia Asmat terhitung dari September 2017 – 29 Januari 2018 sebanyak 71 jiwa. Bencana bagi Manusia Asmat mengundang bantuan baik kunjungan langsung dari pihak pemerintahan dan jajarannya, obat-obatan maupun bahan makanan terus mengalir ke Kabupaten Asmat.

---

<sup>6</sup>Willem Bobi, "Dukun Asmat: Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia", 2015, hal. 30.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal.31

<sup>8</sup>*Op.Cit.* Kompas, Rabu, 10 Januari 2018

Di media online seperti kompas.com menyebutkan sebanyak 71 orang meninggal dalam kasus gizi buruk dan campak di Asmat<sup>9</sup>. Jumlah kematian ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita Moeloek setelah rapat terbatas mengenai penanggulangan KLB Asmat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Di media BBC Indonesia menyebutkan sekitar 60 anak telah meninggal dalam KLB di Asmat. Menariknya, BBC membenturkannya dengan triliunan rupiah yang dikucurkan<sup>10</sup>. Media ini menyebutkan dana APBD Asmat untuk kesehatan mencapai 1 triliun. Dana ini masih ditambah lagi dengan dana Otsus sebesar 106 miliar. Di media voaindonesia.com menyebutkan sedikitnya 70 orang meninggal di Asmat akibat gizi buruk dan campak<sup>11</sup>. Di media tirto.id menyebutkan sekitar 63 anak meninggal dunia karena wabah campak dan gizi buruk<sup>12</sup>.



Media Kompas, 27 Januari 2018  
Dok. SKPKC FP

Tabel daftar Korban KLB  
Berdasarkan Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats  
(September 2017 – Januari 2018)

No	Distrik	Kampung	Gizi Buruk	Campak	Jumlah
1	Pulau Tiga	As	0	8	8
		Atat	0	23	23
		Kapi	0	2	2
		Nakai	0	4	4
2	Fayit	Isar	0	1	1
		Nanai	0	1	1
		Pirien	0	12	12
		Ocenep	0	1	1
3	Aswi	Bawos	0	5	5
		Tauro	0	3	3
4	Akat		0	4	4
5	RSUD		4	3	7
<b>Total</b>					<b>71</b>

<sup>9</sup>Bdk. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat>, diakses Kamis, 17 Mei 2018

<sup>10</sup>Bdk. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894>, diakses Kamis, 17 Mei 2018

<sup>11</sup>Bdk. <https://www.voaindonesia.com/a/sedikitnya-70-orang-meninggal-di-asmat-akibat-gizi-buruk-dan-campak/4226320.html>, diakses Kamis, 17 Mei 2018

<sup>12</sup>Bdk. <https://tirto.id/negara-indonesia-tidak-adil-terhadap-orang-papua-cD4d>, diakses Kamis, 17 Mei 2018

Pemberitaan yang sangat luar biasa tentang KLB Asmat tersebut mengganggu Presiden RI Joko Widodo untuk mengundang Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Bupati Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge untuk menjelaskannya di Istana Kepresidenan. Pada pertemuan ini, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencana untuk melakukan relokasi masyarakat Asmat<sup>13</sup>. Selain itu dalam kunjungannya ke Indonesia pada 9-18 April 2018, Pelapor Khusus Hak Atas Pangan PBB Hilal Elver juga memperhatikan Bencana Kemanusiaan di Asmat tersebut. Pada kesempatan itu, Hilal menyampaikan bahwa kondisi ini tidak hanya memalukan, tapi merugikan masyarakat Papua, karena layanan kesehatan merupakan kewajiban negara. Masyarakat dapat menggugat negara karena lalai memberikan pelayanan publik yang tidak berjalan<sup>14</sup>. Kalau kita merujuk pada peraturan atau perundangan yang berlaku, sangat jelas dirincikan di dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Bab II, Pasal 4 dijelaskan pelayanan publik harus berasaskan partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan. Selanjutnya di Bab IV, pasal 15 point d penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang berkualitas. Poin e, dijelaskan penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas. Poin f, dijelaskan penyelenggara berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

## Mengapa Terjadi Kejadian Luar Biasa

Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat bersama timnya sudah berusaha melakukan pencegahan. Tim Dinkes Kabupaten Asmat melakukan kegiatan pengobatan dan imunisasi dengan jasa Puskesmas Keliling. Walaupun demikian, ada kendala yang dihadapi yakni tidak semua wilayah di Kabupaten Asmat mudah/bisa dijangkau dan pola hidup masyarakat kadang berpindah-pindah. Selain itu para petugas medis juga sangat terbatas jumlahnya. Dengan petugas medis yang terbatas, para petugas medis harus melayani 23 distrik dan 224 kampung<sup>15</sup>.

Kalau kita merujuk pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia tahun 2015 yang dikeluarkan *World Food Programme* (WFP) dan Kementerian Pertanian, Kabupaten Asmat termasuk dalam prioritas dua. Daerah atau kabupaten yang masuk dalam prioritas 1 dan 2 merupakan kabupaten dengan kecenderungan kerawanan pangan dan gizi yang sangat rendah.

Peristiwa kesakitan, penderitaan atau bencana yang menimpa Manusia Asmat, membangkitkan rasa empati, kecewa, sedih, marah. Bencana itu terpaksa dialami kebanyakan generasi penerus Manusia Asmat. Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats, Pater Linus Dumatubun, Pr, ketika diwawancarai pada Selasa, 23 Januari 2018, menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak terlepas dari pola hidup masyarakat dan perhatian dari Pemda Kabupaten Asmat, khususnya Dinas Kesehatan Asmat.

*“Kasus ini sebenarnya sudah lama dialami oleh masyarakat di Asmat sini. Kasus ini juga sudah pernah kami sampaikan ke Pemkab Asmat. Para petugas medis memang sangat jarang untuk melakukan pelayanan di daerah-daerah terkena musibah tersebut. Selain itu juga, pola masyarakat yang kebanyakan mulai berubah dengan segala tawaran yang ada. Dulu masyarakat biasa tangkap*

<sup>13</sup>Bdk. <https://www.youtube.com/watch?v=rol9jDAtg74>, diakses Senin, 4 Juni 2018.

<sup>14</sup>Bdk. <http://tabloidjubi.com/artikel-15589-pbb--papua-adalah-contoh-luar-biasa-darurat-pangan-saat-ini.html>, diakses Senin, 4 Juni 2018. Dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab IV, Pasal 18 dijelaskan masyarakat berhak mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan.

<sup>15</sup>Berdasarkan data BPS Kabupaten Asmat di tahun 2014, sekitar 224 orang tenaga medis yang melayani di Kabupaten Asmat.

*ikan dan pergi tokok sagu untuk kebutuhan perutnya. Sekarang berubah. Harus beli supermie, ikan sardin<sup>16</sup>”*

Pernyataan Pater Linus ini coba digambarkan lagi oleh Pater Alexandro Rangga, OFM di dalam tulisannya “Melihat KLB Asmat dari Dekat”<sup>17</sup>. Di dalam tulisan ini Pater Sandro menjelaskan ada dua hal mengapa terjadi KLB tersebut. Pertama adalah pola hidup masyarakat yang berubah, secara khusus pola konsumsi. Manusia Asmat yang sebelumnya rajin dan pintar meramu makanan yang disediakan alam, kini berubah. Pasca kucuran dana yang berlimpah ruah entah itu bantuan dana desa, proyek pemberdayaan dan dana Otsus, model atau gaya konsumsi masyarakat turut berubah. Alam atau hutan yang dulunya dijadikan ‘supermarket, tokoh atau kios’ untuk memenuhi kebutuhan mereka, kini jarang dikunjungi. Kebanyakan kini, masyarakat Asmat lebih senang dan mungkin merasa gampang berkunjung ke supermarket, tokoh dan kios yang sebenarnya. Masyarakat bukan mencari makanan di alam atau hutan tetapi mencarinya di tokoh atau kios yang ada di sana. Selain itu kepercayaan akan penyembuhan secara tradisional masih kuat. Bukannya tidak mempercayai pengobatan yang dilakukan secara tradisional melainkan Asmat yang sekarang berbeda dengan Asmat yang dulu. Asmat sekarang sudah banyak terpengaruh dan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan luar. Apakah Manusia Asmat mampu menyaringnya?



Hal kedua yang dijelaskan Pater Sandro dalam tulisannya adalah buruknya layanan publik kepada masyarakat Asmat. Keadaan semakin buruk karena tidak adanya sinergitas antara pemerintah kampung, petugas kesehatan dan pemerintah kabupaten. Kebanyakan petugas kesehatan menerima gaji buta tanpa melakukan pelayanan di tempat tugasnya. Banyak balai kesehatan (Puskesmas dan Pustu) menjadi bangunan tua, tidak ada aktivitas dan menjadi tidak terawat. Masyarakat tetap menjadi korban. Selain itu, kontrol yang ketat dari Pemerintah Kabupaten Asmat terhadap para petugasnya tidak berjalan dengan baik.

Ketika kita merujuk pada penjelasan materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Silvanus Sumule, ada pola yang sama untuk Kejadian Luar Biasa. Dalam pemaparan materinya, dr. Sumule menyebutkan beberapa hal antara lain, kematian yang terjadi pada bayi/anak oleh karena tidak mendapatkan imunisasi, lokasi kejadian pada daerah terisolir, petugas kesehatan tidak ada atau tidak berada di tempat tugasnya, fasilitas kesehatan yang sangat minim dengan sanitasi yang jelek, penduduk menyebar dengan jarak ke fasilitas kesehatan yang sangat jauh dan sulit dan kondisi gizi buruk atau busung lapar<sup>18</sup>.

Masih banyak faktor atau alasan yang lainnya yang menyebabkan ‘Bencana Kemanusiaan atau KLB’ di Asmat. Alasan-alasan yang digambarkan di atas kiranya membuka wawasan kita untuk menemukan alasan lainnya guna melihat secara lebih mendalam Kejadian Luar Biasa di Asmat.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Pater Linus Dumatubun, Pr, 20 April 2018

<sup>17</sup>Bdk. <http://fransiskanpapua.org/2018/01/31/melihat-klb-asmat-dari-dekat/>, diakses pada 24 Mei 2018

<sup>18</sup>Materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silvanus Sumule pada diskusi dialog sektoral yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) di Aula Susteran DSY Marantha Waena, Kota Jayapura, 29 September 2017

## Penanganan yang Selalu Terlambat

Melihat kejadian yang menimpah Manusia Asmat, kita bisa bandingkan dengan kejadian yang serupa dengan Bencana di Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga (tahun 2015-2016), Distrik Yigi, Kabupaten Nduga (2017), Saminage, Kabupaten Yahukimo (April 2013 dan September 2017), Suku Korowai (2016-2017), Tigi Barat, Kabupaten Deiyai (Januari-Juni 2017), Lanny Jaya (2017), Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang (Januari 2018) dan mungkin masih banyak bencana kesehatan lainnya yang belum terungkap. Beberapa kasus yang disebutkan ini, proses penanganannya pun hampir sama dengan Kejadian Luar Biasa yang terjadi pada Manusia Asmat. Bantuan kesehatan dari pihak yang berwenang selalu terlambat. Bantuan baru diberikan ketika kasus atau peristiwanya sudah diberitakan oleh media dan tekanan publik. Instansi kesehatan dan pemerintah terkesan 'kaget' dan segera memberikan bantuannya.

Merujuk pada Bencana Kemanusiaan di Asmat, setelah diberitakan oleh Media Cetak Kompas pada 8 Januari 2018, Tim Pemda Asmat mulai melakukan pertemuan untuk membentuk tim penanggulangan Bencana tersebut. Tim ini melakukan survey atau pengamatan pada keesokan harinya tanggal 9 Januari di wilayah Nakai<sup>19</sup>. Tim bersepakat bahwa akan menetap selama tiga hari di daerah-daerah yang terjangkau campak. Bantuan pelayanan kesehatan dan pemberian imunisasi dilaksanakan selama tiga hari yakni 10-13 Januari 2018. Dan pada tanggal 14 Januari dibentuklah sebuah tim besar untuk menjangkau ke-23 distrik di Kabupaten Asmat<sup>20</sup>. Berdasarkan hasil penanganan ini, dilaporkan bahwa sebanyak 933 anak mendapatkan imunisasi campak dan pemberian vitamin A serta makanan tambahan. Pada 17 Januari 2018, Tim Terpadu Penanggulangan KLB Asmat yang melibatkan Dinkes Asmat, Kementerian Kesehatan RI, TNI dan Polri, melakukan pelayanan di 117 kampung dari 19 distrik. Tim terpadu ini dibagi menjadi 8 Satuan Tugas (Satgas). Mereka memeriksa sebanyak 12.398 anak. Dari jumlah ini ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk<sup>21</sup>.

Di bulan April, tepatnya 12 April 2018, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungannya ke Asmat. Sebelumnya, pada Kamis, 22 Februari 2018, Asmat mendapat kunjungan dari 4 Menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial. Mungkin dilihat sudah cukup bantuannya dan pengobatan yang dilakukan, pada 5 Februari 2018, Bupati Asmat, Elisa Kambu mengeluarkan surat resmi untuk pencabutan KLB Asmat. Walaupun demikian, bukan mengakhiri juga tugas dan tanggung jawab dari pemberi layanan.

Tim dari Keuskupan Agats juga membantu melakukan pelayanan. Tim ini bergerak di Kampung Warse, Akamar, Birak, Distrik Jetsi, Kampung Sesakam, Pau, Katew, Amborep dan Kampung Dawer<sup>22</sup>.

Pertanyaan untuk kita renungkan bersama Apakah pelayanan secara maksimal baru diberikan setelah ada kasus?

---

<sup>19</sup>Bdk. Laporan Tim Pemda dalam rangka penanganan wabah campak dan dampak gizi buruk. Laporan ini diperoleh dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2018/01/25/14070311/satgas-terpadu-klb-asmat-temukan-646-kasus-campak-dan-144-gizi-buruk>, diakses pada Kamis, 17 Mei 2018

<sup>22</sup>Bdk. Laporan Tim Penanganan Kasus Campak dan Gizi Buruk dari SKP Keuskupan Agats yang tidak dipublikasikan



## **Yang Harus Dikerjakan**

### **Pemerintah Kabupaten Asmat:**

1. Pengawasan atau kontrol yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Asmat terkait kinerja setiap instansi atau SKPD yang ada
2. Penyuluhan dan pelayanan medis dilakukan secara berkelanjutan
3. Pemerintah Kabupaten Asmat dapat memberhentikan para petugas medis yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
4. Setiap petugas yang melayani di Daerah Asmat sebaiknya dibekali dengan pengetahuan tentang budaya dan tradisi Manusia Asmat
5. Pemerintah Kabupaten Asmat membangun dan memberdayakan Manusia Asmat dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh Manusia Asmat.
6. Pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kesehatan secara bijak dan tepat.
7. Pemerintah Kabupaten Asmat melakukan pengawasan jenis-jenis makanan dan obat-obatan yang kedaularsa yang beredar di daerah Asmat.
8. Program Penyediaan makanan yang bernutrisi sesuai potensi lokal Asmat
9. Tidak menciptakan produk hukum/Perda/kebijakan yang membuat masyarakat menjadi sangat tergantung kepada pemerintah

### **Pemerintah Provinsi Papua**

1. Menseriusi program 1 juta imunisasi yang sudah diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua
2. Program Penyediaan makanan yang bernutrisi
3. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap petugas kesehatan di setiap kabupaten.

### **Pemerintah Pusat**

1. Pemerintah pusat meminimalisir kematian yang terus terjadi di Tanah Papua. Dalam menjamin kondisi kesehatan masyarakat. Menjamin kesehatan ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap SKPD, khususnya SKPD Kesehatan di Kabupaten Asmat.

### **Masyarakat Asmat**

1. Masyarakat Asmat harus merasa bahwa Sehat itu Penting. Hidup sehat adalah kebutuhan dasar
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap setiap petugas kesehatan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan membentuk unit pengawasan dari masyarakat. Unit pengawasan ini bisa terdiri dari Kepala suku, pengiat kesehatan/LSM, Tokoh Gereja, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

### **LSM/NGO, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Gereja**

1. Bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan petugas yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya
2. Memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pendampingan agar masyarakat dapat memahami kebutuhan akan kesehatannya.
3. Membantu atau memfasilitasi masyarakat untuk meneruskan pengaduan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang buruk.